

INTEGRASI ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (ICG) DALAM TATA KELOLA SYARIAH: UPAYA MENCEGAH MISSION DRIFT PADA KOPERASI AUSATH USPPS BLOKAGUNG

Cantik Nikmatur Rahmah^{1*}, Lely Ana Ferawati Ekaningsih²

^{1,2}Universitas KH Mukhtar Syafaat

Email: rahmahcantika01@gmail.com¹, lelyanaferawatiekaningsih@uimsya.ac.id²

ABSTRAK

Koperasi syariah menghadapi tantangan berupa *mission drift*, yaitu pergeseran orientasi dari misi sosial-religius menuju dominasi kepentingan keuntungan. Penelitian ini menganalisis implementasi nilai-nilai *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mendukung pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi *mission drift* pada Koperasi Ausath USPPS Blokagung. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan: (1) Bagaimana nilai-nilai ICG (şiddiq, amanah, tabligh, dan fatanah) diinternalisasikan dalam prosedur operasional? (2) Bagaimana peran strategis DPS dalam mengawal kepatuhan syariah? (3) Bagaimana integrasi ICG dan peran DPS berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi *mission drift*? Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik. Informan utama adalah Manajer USPPS Koperasi Ausath Blokagung yang dipilih secara *purposive*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan analisis data kualitatif Creswell dan Creswell (2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai ICG diwujudkan melalui SOP berbasis Fatwa DSN-MUI, sistem pembagian kewenangan secara berjenjang, evaluasi harian, dan transparansi pelaporan. DPS berperan strategis melalui pengawasan rutin terhadap proses pembiayaan, khususnya dalam memastikan kesesuaian akad, objek pembiayaan, dan mekanisme margin atau bagi hasil dengan prinsip syariah. Integrasi ICG dan pengawasan DPS membentuk mekanisme tata kelola yang mendukung pencegahan dan deteksi dini potensi *mission drift* melalui praktik negosiasi margin, pengelolaan dana ZISWAF, serta pengawasan dan evaluasi internal secara rutin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ICG dan pengawasan DPS membentuk mekanisme tata kelola yang mendukung keseimbangan antara keberlanjutan bisnis, kepatuhan syariah, kepentingan anggota, dan fungsi sosial koperasi. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penggambaran internalisasi nilai-nilai kenabian ke dalam praktik tata kelola koperasi, sedangkan kontribusi praktisnya berupa kerangka tata kelola yang dapat menjadi rujukan bagi penguatan tata kelola koperasi syariah berbasis pesantren.

Kata Kunci: *Tata Kelola Perusahaan Islam, Koperasi Syariah, Penyimpangan Misi, Dewan Pengawas Syariah, Maqāşid al-Syarī'ah.*

ABSTRACT

Islamic cooperatives face a serious challenge of mission drift, namely a shift from socio-religious missions toward profit dominance. This study analyzes the implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) values and the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) as a preventive instrument against mission drift at the Ausath USPPS Cooperative Blokagung. This study aims to answer three questions: (1) How are ICG values (şiddiq, amanah, tabligh, fatanah) internalized in operational procedures? (2) What is the strategic role of DPS in safeguarding sharia compliance? (3) To what extent is ICG integration effective in preventing mission drift? This research employs a qualitative approach with an intrinsic case study design. The key informant is the Manager of

USPPS Koperasi Ausath Blokagung, selected through purposive sampling. Data were collected through semi-structured in-depth interviews and documentation studies, then analyzed using Creswell & Creswell's (2023) five stages of qualitative analysis. The findings reveal that ICG values are manifested through SOPs based on DSN-MUI Fatwas, a tiered authority limit system, daily evaluations, and transparent reporting. The DPS plays a strategic role through routine daily supervision as a final checker for every financing transaction. The integration of ICG and DPS oversight forms governance mechanisms that support the prevention and early detection of potential mission drift through margin negotiation practices, ZISWAF fund management, and routine internal supervision. This study concludes that the integration of ICG and DPS forms a governance mechanism that supports the prevention and early detection of potential mission drift. The findings indicate that the internalization of prophetic values into operational procedures and the active role of DPS help maintain the balance between business sustainability, sharia compliance, and the social mission of the cooperative. The theoretical contribution enriches ICG literature by demonstrating the operational internalization of prophetic values, while the practical contribution offers an applicable governance model for pesantren-based Islamic cooperatives.

Keywords: Islamic Corporate Governance, Islamic Cooperative, Mission Drift, Sharia Supervisory Board, Maqāṣid al-Syarī'ah.

PENDAHULUAN

Koperasi di Indonesia diposisikan sebagai soko guru perekonomian nasional yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Landasan filosofis ini diperkuat oleh asas kekeluargaan dan prinsip keadilan yang melekat dalam sendi-sendi operasional koperasi. Dalam konteks koperasi syariah, prinsip-prinsip tersebut semakin relevan karena harus diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan akuntabilitas dan keadilan¹. Sebagai bagian dari sistem keuangan syariah, koperasi syariah dituntut untuk tidak hanya patuh pada regulasi negara, tetapi juga memenuhi standar tata kelola syariah yang mampu menjaga keseimbangan antara orientasi bisnis dan misi sosial².

Dalam perkembangannya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) hadir sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (LKSNNB) yang mengemban tanggung jawab ganda: menjalankan fungsi bisnis secara profesional sekaligus bertindak sebagai agen pemberdayaan sosial-ekonomi umat berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah³. Keberadaan KSPPS juga diatur dalam POJK Nomor 47 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya tata kelola syariah yang efektif⁴.

Namun, eksistensi koperasi syariah menghadapi tantangan struktural dan kultural. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola dan kepatuhan syariah pada koperasi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan penguatan fungsi pengawasan syariah⁵. Beberapa kajian menunjukkan bahwa efektivitas fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) masih menghadapi tantangan, terutama terkait intensitas keterlibatan dalam pengawasan operasional dan implementasi kepatuhan syariah secara

¹ R. Basiruddin and H. Ahmed, "Corporate Governance and Shariah Non-Compliant Risk in Islamic Banks: Evidence from Southeast Asia," *Corporate Governance (Bingley)*, 2020.

² I. P. Lestari, M. M. Hanafi, and L. I. Wardhana, "A Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements: Implications for Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 11, no. 1 (2025): 91–118.

³ S. N. Aini and R. Indrarini, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Simpanan Syariah," *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 300–315; M. W. R. Hutagalung and S. Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1494–98.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Koperasi Di Sektor Jasa Keuangan," preprint, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.

⁵ Supar, A. Safari, and A. Amelia, "Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift Pada Koperasi Syariah Di Indonesia," *J-EBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2025): 103–14, <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v4.i02.214>.

berkelanjutan⁶. Penelitian Alamer⁷ menegaskan bahwa akuntabilitas dalam tata kelola syariah masih memerlukan penguatan, menciptakan kesenjangan akademis yang mendesak untuk diisi.

Salah satu risiko paling kritis adalah mission drift, yaitu pergeseran orientasi lembaga dari misi sosial-religius menuju dominasi keuntungan semata⁸. Tekanan pasar yang kompetitif, tuntutan pertumbuhan aset, dan target keuangan jangka pendek mendorong manajemen mengorbankan nilai-nilai kemaslahatan kolektif⁹. Penelitian Supar et al.¹⁰ menemukan bahwa lemahnya tata kelola dan kepatuhan syariah menjadi faktor utama mission drift, di mana koperasi cenderung mengutamakan ekspansi bisnis dibandingkan pemberdayaan anggota. Nashrullah et al.¹¹ juga mengidentifikasi bahwa pergeseran misi pada lembaga keuangan syariah berbasis komunitas dipicu oleh dominasi orientasi finansial yang mengabaikan kepentingan anggota dan keadilan transaksi.

Mission drift dalam lembaga keuangan syariah dapat ditandai oleh dominasi orientasi finansial, kecenderungan memilih anggota yang lebih menguntungkan (client skimming), pergeseran dari pelayanan sosial menuju praktik komersial, serta penyalahgunaan mandat kelembagaan¹². Persoalan muncul ketika keuntungan tidak lagi ditempatkan sebagai sarana keberlanjutan, melainkan menjadi orientasi dominan yang menggeser kepentingan anggota, keadilan transaksi, dan fungsi sosial koperasi¹³.

Risiko *mission drift* semakin besar ketika tata kelola syariah tidak mampu mengendalikan orientasi finansial yang berlebihan. Penelitian Basiruddin & Ahmed¹⁴ menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang lemah berkorelasi dengan meningkatnya risiko ketidakpatuhan syariah pada bank syariah di Asia Tenggara.

Berdasarkan kompleksitas tersebut, integrasi Islamic Corporate Governance (ICG) menjadi keniscayaan strategis. ICG menawarkan model tata kelola holistik yang menempatkan akuntabilitas kepada Allah SWT (*tawhidic accountability*) sebagai fondasi utama¹⁵. Penerapan ICG bertujuan membangun organisasi yang transparan, akuntabel, dan adil, serta memastikan kegiatan usaha

⁶ M. A. D. Hassan, M. H. A. H. Besar, and J. H. Jaidin, "The Role of the Shariah Board in Protecting and Promoting the Stakeholders' Rights in Bahrain," *Journal of Shariah Law Research*, 2024; M. Melhadi, "Strengthening Sharia Compliance in Indonesian Sharia Cooperatives: A Governance-Based Perspective from Islamic Economic Law," *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2026): 146–60, <https://doi.org/10.31958/ab.v6i2.17087>.

⁷ "Accountability in Sharia Governance: Is It Time for Sharia Firms?," *Journal of Corporate Law Studies*, 2022.

⁸ A. A. Yusa et al., "Analisis Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Usaha Koperasi Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Koperasi Bangun Setia Kecamatan Tabir," *SJEE (Scientific Journals of Economic Education)* 10, no. 1 (2026): 1–5, <https://doi.org/10.33087/sjee.v10i1.310>; T. Akbar, "The Quest for Equilibrium: Navigating Hybrid Logics in Indonesian Islamic Microfinance Bank (BPRS)," *Keunis* 13, no. 2 (2025): 246–59, <https://doi.org/10.32497/keunis.v13i2.6503>.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2024," preprint, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2025.

¹⁰ "Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift Pada Koperasi Syariah Di Indonesia."

¹¹ "Institutionalizing Social Entrepreneurship in Pesantren Business Units: A Qualitative Study of Sustainable Community Empowerment in East Java," *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 9, no. 2 (2026): 393–409, <https://doi.org/10.52166/adilla.v9i2.8033>.

¹² Akbar, "The Quest for Equilibrium: Navigating Hybrid Logics in Indonesian Islamic Microfinance Bank (BPRS)"; Murah, R. Rahman, and R. Harris, "Impact Investing vs. Philanthropy: A Comparative Analysis of Funding Models for Long-Term Sustainability in Social Entrepreneurship," *Journal of Social Entrepreneurship and Creative Technology* 2, no. 4 (2025): 187–201, <https://doi.org/10.70177/jseact.v2i4.2595>; Purwanto et al., "Alleviating Poverty through Islamic Microfinance: Outreach and Efficiency (Study on BMT and Islamic Cooperatives in Indonesia)," *Ekonomika Regiona* 16, no. 4 (2020): 1362–76, <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-4-24>.

¹³ Akbar, "The Quest for Equilibrium: Navigating Hybrid Logics in Indonesian Islamic Microfinance Bank (BPRS)"; Nashrullah et al., "Institutionalizing Social Entrepreneurship in Pesantren Business Units: A Qualitative Study of Sustainable Community Empowerment in East Java"; Yusa et al., "Analisis Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Usaha Koperasi Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Koperasi Bangun Setia Kecamatan Tabir."

¹⁴ "Corporate Governance and Shariah Non-Compliant Risk in Islamic Banks: Evidence from Southeast Asia."

¹⁵ S. Srivastava, M. Singh, and S. P. Srivastava, *Framework for Measuring the Impact of Islamic Corporate Governance on Sustainable Growth BT - Islamic Finance and Corporate Governance: Synergies for Sustainable Growth* (2025).

terbebas dari riba, gharar, dan maisir¹⁶. Penelitian Lestari et al.¹⁷ mengidentifikasi bahwa ICG mencakup tata kelola dewan syariah, manajemen, dan tata kelola berkelanjutan yang berkontribusi pada kinerja perusahaan.

Srivastava et al.¹⁸ menegaskan bahwa ICG memainkan peran signifikan dalam memastikan keberlanjutan organisasi dengan menyelaraskannya dengan tujuan syariah. Kajian pada Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi Ausath Blokagung menjadi relevan karena beberapa alasan. Pertama, koperasi ini beroperasi di lingkungan pesantren dengan modal sosial dan kultural yang kuat untuk mengimplementasikan tata kelola berbasis syariah secara konsisten¹⁹. Kedua, koperasi ini menghadapi tantangan ganda: profesional secara bisnis namun tetap mempertahankan identitas keislaman sebagai lembaga pemberdayaan umat. Ketiga, urgensi penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang internalisasi nilai ICG dan pengawasan DPS sebagai instrumen preventif mission drift, serta mengisi kesenjangan akademis di tingkat LKSNB²⁰.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik. Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap tata kelola serta operasional USPPS Koperasi Ausath Blokagung. Informan penelitian adalah Manajer USPPS Koperasi Ausath Blokagung yang dipandang memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan tata kelola, prosedur operasional, pengawasan syariah, dan aktivitas pembiayaan koperasi.

Penelitian terdahulu telah membahas ICG, DPS, dan mission drift secara terpisah. Namun, masih terbatas penelitian yang secara empiris menghubungkan internalisasi nilai-nilai ICG, praktik pengawasan DPS, dan mekanisme pencegahan mission drift dalam konteks USPPS berbasis pesantren. Kesenjangan tersebut menjadi ruang penelitian ini untuk menganalisis bagaimana nilai ICG diterjemahkan ke dalam mekanisme tata kelola dan bagaimana mekanisme tersebut berkontribusi terhadap pemeliharaan keseimbangan antara orientasi ekonomi dan fungsi sosial koperasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berfokus pada praktik tata kelola di USPPS Koperasi Ausath Blokagung dengan menelaah internalisasi nilai-nilai ICG dalam prosedur operasional, peran strategis DPS dalam menjaga kepatuhan syariah, serta mekanisme tata kelola yang dapat mendukung pencegahan dan deteksi dini potensi mission drift. Fokus tersebut diarahkan untuk memahami bagaimana orientasi bisnis koperasi dapat tetap berjalan beriringan dengan fungsi sosial dan prinsip kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana nilai-nilai ICG (siddiq, amanah, tabligh, fatanah) diinternalisasikan dalam prosedur operasional USPPS Koperasi Ausath Blokagung? (2) Bagaimana peran strategis DPS dalam mengawal kepatuhan syariah? (3) Bagaimana integrasi ICG dan peran DPS berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi mission drift?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan dan menganalisis implementasi nilai-nilai ICG dalam prosedur operasional; (2) menganalisis peran strategis DPS dalam mengawal kepatuhan syariah; dan (3) menganalisis bagaimana integrasi ICG dan peran DPS berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi mission drift.

¹⁶ M. F. Riziqiyah, L. K. Wati, and R. Setyorini, "Peningkatan Keberlanjutan Usaha Koperasi Melalui Penguatan Tata Kelola," *Jurnal Kreativitas Dan Inovasi (Jurnal Kreanova)* 5, no. 3 (2025): 112–24, <https://doi.org/10.24034/kreanova.v5i3.7302>.

¹⁷ "A Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements: Implications for Indonesia."

¹⁸ *Framework for Measuring the Impact of Islamic Corporate Governance on Sustainable Growth BT - Islamic Finance and Corporate Governance: Synergies for Sustainable Growth*.

¹⁹ M. Irawan et al., "Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Pada Pondok Pesantren Modern Al Muttaqien Balikpapan," *BIFEJ (Borneo Islamic Finance and Economics Journal)* 2, no. 1 (2022): 37–51, <https://doi.org/10.21093/bifej.v0i0.4638>; A. T. Solihati et al., "Integrasi Konsep Koperasi Sebagai Organisasi Bisnis Dengan Strategi Manajemen Dakwah Untuk Membangun Kemandirian Ekonomi Dan Sosial Umat," *JURIMBIK* 6, no. 1 (2026): 503–20.

²⁰ A. Iswandi, "Tata Kelola Koperasi Syariah Di Indonesia: Studi Literatur Review," *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 15, no. 02 (2021): 101–9, <https://doi.org/10.59833/altasyree.v15i02.1527>.

Secara teoretis, penelitian ini mengisi kesenjangan akademis terkait efektivitas ICG di tingkat LKSBN dan berkontribusi pada pengembangan teori ICG dengan menunjukkan internalisasi operasional nilai-nilai kenabian. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi panduan bagi pengelola koperasi syariah, DPS, regulator, dan asosiasi koperasi dalam memperkuat tata kelola syariah untuk mencegah mission drift (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Penelitian ini menggunakan sintesis dua kerangka teoretis utama: teori ICG yang menekankan nilai karakter kenabian (*ṣiddiq*, *amanah*, *tabligh*, *fatanah*) sebagai fondasi etika bisnis²¹, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan lima elemen dasar sebagai tujuan akhir kebijakan ekonomi²².

Meskipun kajian mengenai Islamic Corporate Governance, tata kelola syariah, dan peran DPS telah berkembang, penelitian yang secara empiris menghubungkan internalisasi nilai-nilai ICG, mekanisme pengawasan DPS, dan upaya pencegahan mission drift pada tingkat USPPS masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut terutama terlihat pada kajian yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai etika Islam diterjemahkan ke dalam prosedur operasional dan mekanisme pengendalian organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis praktik tata kelola pada USPPS Koperasi Ausath Blokagung sebagai koperasi syariah yang beroperasi dalam lingkungan pesantren.

LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESES DEVELOPMENT (QUANTITATIVE) OR LITERATURE REVIEW (QUALITATIVE) (KAJIAN PUSTAKA)

1. Islamic Corporate Governance (ICG)

Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan pengembangan konsep *corporate governance* yang mengintegrasikan prinsip tata kelola perusahaan dengan nilai-nilai syariah. Berbeda dengan tata kelola konvensional yang berorientasi pada efisiensi dan perlindungan pemangku kepentingan, ICG menambahkan dimensi spiritual dan moral sebagai landasan utama, di mana setiap keputusan bisnis dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT²³. Srivastava et al.²⁴ menegaskan bahwa ICG mempromosikan nilai-nilai syariah dan membangun budaya kepercayaan yang melindungi dari pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Penerapan ICG bertujuan membangun organisasi yang transparan, akuntabel, dan adil, serta memastikan kegiatan usaha terbebas dari riba, gharar, dan maisir²⁵. Lestari et al.²⁶ mengidentifikasi bahwa ICG mencakup tata kelola dewan syariah, manajemen, dan tata kelola berkelanjutan. Implementasi ICG diwujudkan melalui DPS, fungsi kepatuhan syariah, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan audit syariah²⁷.

Selain aspek kelembagaan, ICG menekankan internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam budaya organisasi, yaitu *ṣidq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (transparan), dan *fatanah* (profesional) yang menjadi fondasi perilaku pengelola koperasi²⁸. Penelitian Fahrudin et

²¹ Supar, Safari, and Amelia, "Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift Pada Koperasi Syariah Di Indonesia"; Srivastava, Singh, and Srivastava, *Framework for Measuring the Impact of Islamic Corporate Governance on Sustainable Growth BT - Islamic Finance and Corporate Governance: Synergies for Sustainable Growth*.

²² Hutagalung and Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia"; A. T. Lubis, "Akuntabilitas Berbasis Transendensi: Penerapan Shariah Enterprise Theory Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Welfare: Journal of Islamic Economics and Finance* 5, no. 1 (2026): 53–70.

²³ Srivastava, Singh, and Srivastava, *Framework for Measuring the Impact of Islamic Corporate Governance on Sustainable Growth BT - Islamic Finance and Corporate Governance: Synergies for Sustainable Growth*.

²⁴ *Framework for Measuring the Impact of Islamic Corporate Governance on Sustainable Growth BT - Islamic Finance and Corporate Governance: Synergies for Sustainable Growth*.

²⁵ Riziqiyah, Wati, and Setyorini, "Peningkatan Keberlanjutan Usaha Koperasi Melalui Penguatan Tata Kelola."

²⁶ "A Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements: Implications for Indonesia."

²⁷ Melhadi, "Strengthening Sharia Compliance in Indonesian Sharia Cooperatives: A Governance-Based Perspective from Islamic Economic Law"; N. A. M. Puad, N. I. Abdullah, and Z. Shafii, *The Effect of Institutional Theory Toward Shariah Audit Practice in Malaysian Takaful Industry*, ed. N. Mansour and L. M. B. B. T.-Islamic Sustainable Finance Vadell Law and Innovation (Springer Nature Switzerland AG, 2023).

²⁸ Supar, Safari, and Amelia, "Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift Pada Koperasi Syariah Di Indonesia"; Srivastava, Singh, and Srivastava, *Framework for Measuring the Impact of Islamic*

al.²⁹ dan Ridho & Ifada³⁰ menunjukkan bahwa penerapan ICG berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan dan non-keuangan lembaga keuangan syariah.

2. Konsep Maqāsid al-Syarī'ah dalam Koperasi Syariah

Maqāsid al-syarī'ah merupakan tujuan utama syariat Islam yang menempatkan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai orientasi utama setiap kegiatan ekonomi³¹. Lubis³² menegaskan bahwa akuntabilitas berbasis transendensi dalam lembaga keuangan mikro syariah mencakup pertanggungjawaban horizontal kepada pemangku kepentingan dan vertikal kepada Allah SWT.

Pada koperasi syariah, implementasi maqāsid tercermin melalui upaya menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pemberdayaan anggota. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta³³. Ridho & Ifada³⁴ mengembangkan pendekatan *Maqashid Sharia Concordance* (MSC) yang mengukur kinerja berdasarkan pencapaian tujuan syariah. Penelitian Nashrullah et al.³⁵, Solihati et al.³⁶, dan Akbar³⁷ menunjukkan bahwa institusionalisasi nilai-nilai sosial dalam lembaga keuangan syariah berbasis komunitas memerlukan pendekatan maqāsid sebagai kerangka keseimbangan antara orientasi sosial dan komersial.

Dalam penelitian ini, *maqāsid al-syarī'ah* digunakan sebagai perspektif interpretatif untuk membaca apakah praktik tata kelola koperasi mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, perlindungan kepentingan anggota, keadilan transaksi, kepatuhan syariah, dan fungsi sosial lembaga. Dengan demikian, maqāsid tidak ditempatkan sebagai variabel yang diukur secara kuantitatif, tetapi sebagai landasan untuk menafsirkan orientasi kemaslahatan dari praktik tata kelola yang ditemukan di lapangan.

3. Teori Mission Drift

Mission drift merupakan pergeseran orientasi organisasi dari tujuan sosial-religius menuju kepentingan ekonomi atau komersial³⁸. Fenomena ini terjadi ketika keuntungan, pertumbuhan aset, dan ekspansi bisnis lebih diutamakan dibandingkan fungsi sosial dan kepatuhan syariah. Faktor penyebabnya meliputi lemahnya pengawasan internal, rendahnya kualitas tata kelola, tekanan persaingan, dan kurang optimalnya peran DPS³⁹.

Dalam perspektif ICG, *mission drift* dipandang sebagai penyimpangan terhadap amanah anggota. Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh indikator keuangan, tetapi juga

Corporate Governance on Sustainable Growth BT - Islamic Finance and Corporate Governance: Synergies for Sustainable Growth.

²⁹ "Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Di KSPPS BMT TAMZIS BINA UTAMA Cabang Secang Kabupaten Magelang," *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2023): 45–58.

³⁰ *Assessment of Financial Performance of RSI Sultan Agung Semarang Through the Maqashid Sharia Concordance (MSC) Approach*, ed. N. Mansour and L. M. B. B. T.-Islamic Sustainable Finance Vadell Law and Innovation (Springer Nature Switzerland AG, 2023), 427–33.

³¹ Hutagalung and Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia."

³² "Akuntabilitas Berbasis Transendensi: Penerapan Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah."

³³ Lubis, "Akuntabilitas Berbasis Transendensi: Penerapan Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah."

³⁴ *Assessment of Financial Performance of RSI Sultan Agung Semarang Through the Maqashid Sharia Concordance (MSC) Approach*.

³⁵ "Institutionalizing Social Entrepreneurship in Pesantren Business Units: A Qualitative Study of Sustainable Community Empowerment in East Java."

³⁶ "Integrasi Konsep Koperasi Sebagai Organisasi Bisnis Dengan Strategi Manajemen Dakwah Untuk Membangun Kemandirian Ekonomi Dan Sosial Umat."

³⁷ "The Quest for Equilibrium: Navigating Hybrid Logics in Indonesian Islamic Microfinance Bank (BPRS)."

³⁸ Yusa et al., "Analisis Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Usaha Koperasi Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Koperasi Bangun Setia Kecamatan Tabir"; Akbar, "The Quest for Equilibrium: Navigating Hybrid Logics in Indonesian Islamic Microfinance Bank (BPRS)."

³⁹ Supar, Safari, and Amelia, "Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift Pada Koperasi Syariah Di Indonesia."

konsistensi mempertahankan nilai-nilai syariah⁴⁰. Penelitian Purwanto et al.⁴¹, Murah et al.⁴², Logan⁴³, dan Nkabinde & Mamabolo⁴⁴ menunjukkan bahwa pencegahan *mission drift* memerlukan penguatan tata kelola internal, kepemilikan steward, dan strategi diversifikasi pendanaan.

4. Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS merupakan organ tata kelola yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga kepatuhan syariah pada seluruh aktivitas koperasi. DPS bertanggung jawab memberikan arahan, pengawasan, dan evaluasi agar kebijakan operasional sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah⁴⁵. Puad et al.⁴⁶ menegaskan bahwa praktik audit syariah dipengaruhi oleh faktor regulasi, normatif, dan kognitif.

Pengawasan DPS meliputi proses penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, penyusunan kebijakan, hingga penyelesaian permasalahan operasional⁴⁷. Srivastava et al.⁴⁸ dan Lestari et al.⁴⁹ menunjukkan bahwa tata kelola dewan syariah merupakan elemen kunci ICG yang mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan lembaga. DPS berperan sebagai mitra strategis bagi pengurus dalam membangun budaya organisasi yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan anggota⁵⁰.

5. Hubungan ICG dengan Pencegahan Mission Drift

ICG hadir sebagai mekanisme tata kelola yang menjaga keseimbangan antara pencapaian ekonomi dan prinsip syariah. Berbeda dengan tata kelola konvensional, ICG menempatkan kepatuhan syariah sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan, sehingga aktivitas koperasi tetap dalam koridor nilai kejujuran, amanah, transparansi, dan profesionalisme⁵¹.

Implementasi ICG yang konsisten memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas pengawasan, dan memperjelas pembagian tugas, sehingga peluang penyimpangan tujuan organisasi dapat⁵². Penelitian Aslam & Haron⁵³ menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berkontribusi pada peningkatan kinerja bank syariah di negara-

⁴⁰ Lubis, "Akuntabilitas Berbasis Transendensi: Penerapan Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah."

⁴¹ "Alleviating Poverty through Islamic Microfinance: Outreach and Efficiency (Study on BMT and Islamic Cooperatives in Indonesia)."

⁴² "Impact Investing vs. Philanthropy: A Comparative Analysis of Funding Models for Long-Term Sustainability in Social Entrepreneurship."

⁴³ "Unveiling the Power of Steward Ownership: A Case Study on Combatting Mission-Drift in Social Enterprises" (University of Amsterdam & Vrije University Amsterdam, 2024).

⁴⁴ "The South African Social Enterprises' Strategies to Guard against Mission Drift When Faced with Tensions from the Funders," *Cogent Business & Management* 9 (2022): 2135215, <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2135215>.

⁴⁵ Melhadi, "Strengthening Sharia Compliance in Indonesian Sharia Cooperatives: A Governance-Based Perspective from Islamic Economic Law."

⁴⁶ *The Effect of Institutional Theory Toward Syariah Audit Practice in Malaysian Takaful Industry*.

⁴⁷ Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Koperasi Di Sektor Jasa Keuangan."

⁴⁸ *Framework for Measuring the Impact of Islamic Corporate Governance on Sustainable Growth BT - Islamic Finance and Corporate Governance: Synergies for Sustainable Growth*.

⁴⁹ "A Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements: Implications for Indonesia."

⁵⁰ Supar, Safari, and Amelia, "Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift Pada Koperasi Syariah Di Indonesia"; Ridho and Ifada, *Assessment of Financial Performance of RSI Sultan Agung Semarang Through the Maqashid Sharia Concordance (MSC) Approach*.

⁵¹ Supar, Safari, and Amelia, "Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift Pada Koperasi Syariah Di Indonesia"; Srivastava, Singh, and Srivastava, *Framework for Measuring the Impact of Islamic Corporate Governance on Sustainable Growth BT - Islamic Finance and Corporate Governance: Synergies for Sustainable Growth*.

⁵² I. Khan and S. N. Zahid, "The Impact of Shari'ah and Corporate Governance on Islamic Banks Performance: Evidence from Asia," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2020; Riziqiyah, Wati, and Setyorini, "Peningkatan Keberlanjutan Usaha Koperasi Melalui Penguatan Tata Kelola."

⁵³ "Does Corporate Governance Affect the Performance of Islamic Banks? New Insight into Islamic Countries," *Corporate Governance (Bingley)*, 2020.

negara Islam. ICG juga memiliki hubungan erat dengan maqāṣid al-syarī'ah, di mana tata kelola yang baik mendorong pengelolaan dana bertanggung jawab, distribusi manfaat adil, dan perlindungan hak-hak anggota⁵⁴. Penelitian Nashrullah et al.⁵⁵, Solihati et al.⁵⁶, dan Fahrudin et al.⁵⁷ menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai sosial, strategi manajemen dakwah, dan akad syariah yang sesuai dengan prinsip ICG dan maqāṣid merupakan kunci keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini berfokus pada analisis integrasi ICG dan peran DPS sebagai instrumen preventif mission *drift* pada USPPS Koperasi Ausath Blokagung, mencakup analisis mekanisme tata kelola terintegrasi dalam menjaga keseimbangan antara profit dan misi sosial-keagamaan, serta identifikasi mekanisme pencegahan dan deteksi dini melalui negosiasi margin adil, pengelolaan ZISWAF, evaluasi harian, dan akuntabilitas vertikal⁵⁸. Fokus ini sejalan dengan rekomendasi studi kasus kualitatif untuk menghasilkan temuan mendalam dan relevan bagi penguatan tata kelola syariah di LKSNB⁵⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui mekanisme pengawasan aktif dan internalisasi sifat kenabian, USPPS Koperasi Ausath Blokagung berupaya mewujudkan akuntabilitas vertikal-teosentris yang menempatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai prioritas utama di atas target bisnis semata. Analisis dalam bab ini dibagi menjadi tiga sub-bahasan utama yang merujuk pada rumusan masalah penelitian, yakni implementasi nilai ICG dalam prosedur organisasi, peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta kerangka tata kelola tersebut sebagai instrumen preventif pergeseran misi lembaga. Setiap sub-bahasan disajikan dengan mengintegrasikan temuan wawancara, bukti dokumentasi, serta analisis kritis yang menghubungkan temuan dengan teori dan penelitian terdahulu.

1. Implementasi Nilai ICG (Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah) dalam Struktur Organisasi

Implementasi nilai-nilai ICG di Koperasi Ausath USPPS Blokagung diwujudkan melalui proses internalisasi sifat-sifat kenabian (*ṣifāt nabawīyyah*) yang secara sadar diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional formal koperasi. Proses internalisasi ini bukan sekadar retorika moral, melainkan sebuah strategi tata kelola yang dirancang untuk membentuk ekosistem organisasi yang beretika, di mana setiap keputusan bisnis senantiasa diuji oleh nilai-nilai transendental. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif yang fundamental agar pengelolaan koperasi tidak terperangkap pada orientasi bisnis semata (*profit-oriented*) yang mengabaikan prinsip etika dan moral Islam, yang jika dibiarkan dapat menggerus identitas keislaman lembaga dan kepercayaan anggota.

Temuan tersebut menunjukkan adanya upaya koperasi untuk menjadikan nilai-nilai etika Islam sebagai bagian dari mekanisme tata kelola. Internalisasi nilai tersebut dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko penyimpangan dari misi kelembagaan. Hal ini

⁵⁴ Lubis, "Akuntabilitas Berbasis Transendensi: Penerapan Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah."

⁵⁵ "Institutionalizing Social Entrepreneurship in Pesantren Business Units: A Qualitative Study of Sustainable Community Empowerment in East Java."

⁵⁶ "Integrasi Konsep Koperasi Sebagai Organisasi Bisnis Dengan Strategi Manajemen Dakwah Untuk Membangun Kemandirian Ekonomi Dan Sosial Umat."

⁵⁷ "Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Di KSPPS BMT TAMZIS BINA UTAMA Cabang Secang Kabupaten Magelang."

⁵⁸ Lubis, "Akuntabilitas Berbasis Transendensi: Penerapan Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah"; Nashrullah et al., "Institutionalizing Social Entrepreneurship in Pesantren Business Units: A Qualitative Study of Sustainable Community Empowerment in East Java"; Solihati et al., "Integrasi Konsep Koperasi Sebagai Organisasi Bisnis Dengan Strategi Manajemen Dakwah Untuk Membangun Kemandirian Ekonomi Dan Sosial Umat."

⁵⁹ R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (SAGE Publications, 2018); J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (SAGE Publications, 2018).

sejalan dengan pandangan Srivastava et al.⁶⁰ bahwa ICG mempromosikan nilai-nilai syariah dan membangun budaya kepercayaan yang melindungi dari pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang berada dalam tata kelola. Internalisasi nilai-nilai kenabian juga mencerminkan pemahaman bahwa tata kelola yang baik tidak hanya mengatur hubungan antar pemangku kepentingan, tetapi juga menekankan nilai-nilai etika Islam dalam budaya organisasi⁶¹.

Nilai Amanah yang mengandung makna kepercayaan, tanggung jawab, dan profesionalisme tercermin secara konkret dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara penuh mengintegrasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini mengandung konsekuensi bahwa setiap prosedur operasional, baik yang berkaitan dengan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, maupun pengelolaan risiko, harus memiliki landasan hukum Islam yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang telah difatwakan. Dengan demikian, SOP tidak berfungsi semata sebagai alat administratif, melainkan juga sebagai manifestasi dari kepatuhan syariah yang terlembagakan.

Penyusunan SOP berbasis fatwa ini memiliki implikasi yang luas terhadap keseluruhan operasional koperasi. Setiap kali sebuah prosedur baru dirancang atau prosedur lama direvisi, prosesnya selalu melibatkan konsultasi dengan DPS untuk memastikan kesesuaian syariah. Praktik tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah ditempatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan dan perubahan prosedur operasional. Dalam konteks USPPS Koperasi Ausath Blokagung, konsultasi dengan DPS menjadi bagian dari proses untuk memastikan bahwa perubahan prosedur tetap berada dalam koridor syariah.

Temuan ini sejalan dengan model tata kelola kepatuhan syariah yang mengintegrasikan Fatwa DSN-MUI dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), di mana fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem tata kelola koperasi syariah⁶². Penelitian Lestari et al.⁶³ juga mengidentifikasi bahwa ICG mencakup berbagai elemen yang berkontribusi pada kinerja perusahaan, termasuk tata kelola dewan syariah, manajemen dan tata kelola dewan, serta tata kelola berkelanjutan. Temuan di USPPS Koperasi Ausath Blokagung menunjukkan bahwa elemen-elemen tersebut tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga diinternalisasikan melalui mekanisme operasional yang konkret, seperti SOP berbasis fatwa yang menjadi manifestasi dari kepatuhan syariah yang terlembagakan⁶⁴.

Secara operasional, nilai Fatanah yang merepresentasikan kecerdasan, kebijaksanaan, dan profesionalisme tingkat tinggi diterapkan melalui pembagian wewenang yang jelas dan terukur dalam struktur pengambilan keputusan. Sebagai contoh, manajer diberikan limit pembiayaan hingga Rp50.000.000, yang mencerminkan adanya kepercayaan sekaligus pengendalian internal yang proporsional. Namun, untuk nilai pembiayaan di atas batas tersebut, keputusan tidak dapat diambil secara sepihak oleh manajer, melainkan harus melalui proses konsultasi dan kajian mendalam dengan dewan terkait. Mekanisme berjenjang ini menunjukkan adanya sistem pengendalian internal yang cerdas, yang menggabungkan efisiensi manajerial dengan pengawasan kolektif berbasis syariah.

Limit wewenang yang ditetapkan secara jelas ini memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, ia memberikan ruang gerak yang cukup bagi manajer untuk mengambil keputusan cepat dalam situasi yang membutuhkan respons segera, sehingga tidak menghambat kelancaran operasional. Di sisi lain, ia menciptakan "jaring pengaman" yang mencegah terjadinya penyalahgunaan

⁶⁰ *Framework for Measuring the Impact of Islamic Corporate Governance on Sustainable Growth BT - Islamic Finance and Corporate Governance: Synergies for Sustainable Growth.*

⁶¹ Supar, Safari, and Amelia, "Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift Pada Koperasi Syariah Di Indonesia."

⁶² Riziqiyah, Wati, and Setyorini, "Peningkatan Keberlanjutan Usaha Koperasi Melalui Penguatan Tata Kelola."

⁶³ "A Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements: Implications for Indonesia."

⁶⁴ Lestari, Hanafi, and Wardhana, "A Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements: Implications for Indonesia."

wewenang atau keputusan yang mengabaikan prinsip syariah karena tergesa-gesa atau kurangnya pertimbangan kolegial. Struktur pengambilan keputusan yang berjenjang ini juga mencerminkan penghargaan terhadap prinsip syura (musyawarah) yang menjadi salah satu pilar penting dalam manajemen Islam.

Temuan ini selaras dengan kerangka ICG yang dikembangkan oleh Srivastava, Singh, dan Srivastava⁶⁵, yang menegaskan bahwa ICG memainkan peran signifikan dalam memastikan keberlanjutan pertumbuhan organisasi dengan menyelaraskannya dengan tujuan syariah. ICG mempromosikan nilai-nilai syariah dan membangun budaya kepercayaan yang melindungi dari pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang berada dalam tata kelola⁶⁶. Dalam konteks koperasi, implementasi nilai *sidq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fatanah* melalui prosedur operasional formal merupakan penerapan dari prinsip bahwa tata kelola berbasis nilai menjadi fondasi perilaku seluruh pengelola, sebagaimana ditegaskan dalam literatur ICG bahwa ICG tidak hanya mengatur hubungan antar pemangku kepentingan, tetapi juga menekankan nilai-nilai etika Islam dalam budaya organisasi⁶⁷.

Sementara itu, nilai *Tabligh* yang bermakna transparansi, keterbukaan, dan komunikasi yang jujur diperkuat melalui mekanisme evaluasi internal harian yang dilakukan setiap jam kerja berakhir. Praktik ini berfungsi ganda: pertama, sebagai alat koreksi cepat untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan operasional yang luput dari perhatian; dan kedua, sebagai wahana pembentukan budaya kerja yang responsif dan akuntabel, di mana seluruh aktivitas senantiasa diuji kesesuaiannya dengan visi-misi syariah yang telah ditetapkan.

Evaluasi harian yang dilakukan secara konsisten ini merupakan praktik yang relatif jarang ditemukan di koperasi syariah skala mikro. Kebanyakan koperasi hanya melakukan evaluasi bulanan atau bahkan tahunan, yang sering kali terlambat untuk mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Dengan melakukan evaluasi setiap hari, USPPS Koperasi Ausath Blokagung membangun sistem peringatan dini yang sangat efektif, di mana setiap potensi masalah dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Praktik ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif di antara seluruh pengelola bahwa setiap tindakan mereka diawasi dan dievaluasi, yang pada gilirannya mendorong perilaku yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurafida et al.⁶⁸ yang menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan koperasi merupakan faktor kunci dalam menjaga kepercayaan anggota dan mencegah praktik manipulatif. Transparansi dalam evaluasi harian juga mencerminkan implementasi nilai *tabligh* yang menjadi salah satu pilar ICG, di mana keterbukaan informasi dan komunikasi yang jujur menjadi fondasi hubungan yang sehat antara pengelola dan pemangku kepentingan⁶⁹.

Selain keempat nilai kenabian tersebut, penerapan ICG di koperasi ini juga tercermin dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih luas. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan dan kebijakan margin secara terbuka kepada anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Akuntabilitas terlihat dari laporan pertanggungjawaban pengurus yang mencakup tidak hanya kinerja finansial, tetapi juga capaian program sosial dan tingkat kepatuhan syariah. Kedua prinsip ini memperkuat kepercayaan anggota dan mencegah praktik manipulatif yang dapat menggerus misi sosial koperasi.

⁶⁵ *Framework for Measuring the Impact of Islamic Corporate Governance on Sustainable Growth BT- Islamic Finance and Corporate Governance: Synergies for Sustainable Growth.*

⁶⁶ Srivastava, Singh, and Srivastava, *Framework for Measuring the Impact of Islamic Corporate Governance on Sustainable Growth BT - Islamic Finance and Corporate Governance: Synergies for Sustainable Growth.*

⁶⁷ Srivastava, Singh, and Srivastava, *Framework for Measuring the Impact of Islamic Corporate Governance on Sustainable Growth BT - Islamic Finance and Corporate Governance: Synergies for Sustainable Growth.*

⁶⁸ "Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pelaporan Keuangan Koperasi: Studi Kasus Di Kabupaten Bengkalis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2025): 613–19.

⁶⁹ Supar, Safari, and Amelia, "Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift Pada Koperasi Syariah Di Indonesia."

Nilai Siddiq yang mengandung makna kejujuran juga terinternalisasi dalam pelaporan keuangan dan operasional, di mana pengurus dituntut untuk menyampaikan informasi secara jujur dan tidak manipulatif kepada seluruh pemangku kepentingan⁷⁰.

Penelitian Solihati et al.⁷¹ menambahkan bahwa integrasi konsep koperasi sebagai organisasi bisnis dengan strategi manajemen dakwah dapat membangun kemandirian ekonomi dan sosial umat, yang menjadi ciri khas koperasi berbasis pesantren. Temuan ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai ICG di USPPS Koperasi Ausath Blokagung tidak hanya berfokus pada aspek prosedural, tetapi juga mencakup pembangunan budaya organisasi yang berintegritas, di mana pengelola dituntut untuk tidak hanya akuntabel secara finansial dan administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual di hadapan Tuhan dan anggota.

Secara keseluruhan, implementasi nilai-nilai ICG di USPPS Koperasi Ausath Blokagung mencerminkan komitmen lembaga dalam membangun tata kelola yang berintegritas. Internalisasi nilai-nilai ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan, yang melibatkan seluruh elemen organisasi dari tingkat terendah hingga tertinggi.

Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian pertama bahwa nilai-nilai ICG (*siddiq, amanah, tabligh, fatanah*) diinternalisasikan melalui berbagai mekanisme konkret seperti penyusunan SOP berbasis fatwa, sistem limit wewenang berjenjang, evaluasi harian, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kepada anggota. Internalisasi ini tidak bersifat simbolis, tetapi terintegrasi dalam prosedur operasional formal yang menjadi panduan bagi seluruh aktivitas koperasi.

Penelitian Fahrudin et al.⁷² menegaskan bahwa implementasi akad-akad syariah dalam pembiayaan memerlukan tata kelola yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Temuan di USPPS Koperasi Ausath Blokagung menunjukkan bahwa tata kelola yang kuat dibangun melalui internalisasi nilai-nilai ICG yang konsisten, yang pada gilirannya memperkuat kepatuhan syariah dan mencegah penyimpangan dari misi awal lembaga. Hal ini juga sejalan dengan pandangan bahwa ICG melampaui sekadar pengelolaan sumber daya, melainkan merupakan bentuk ibadah yang mendalam⁷³.

2. Peran Strategis DPS dalam Mengawal Kepatuhan Syariah

Temuan penelitian ini mengungkap sebuah fakta yang secara signifikan berbeda dari asumsi umum yang sering berkembang, yang menggambarkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai fungsi yang cenderung pasif, seremonial, atau bahkan sekadar pelengkap formalitas untuk memenuhi regulasi. Di Koperasi Ausath USPPS Blokagung, realitas yang teramati justru menunjukkan dinamika yang sebaliknya: DPS melakukan pengawasan rutin setiap hari terhadap seluruh permohonan pinjaman yang masuk. Pengawasan harian yang intensif ini tidak bersifat insidental, melainkan terstruktur dan sistematis, di mana setiap permohonan pembiayaan ditelaah secara mendalam dari sisi kesesuaian akad, objek pembiayaan, dan mekanisme bagi hasil atau margin, sebelum akhirnya disetujui atau ditolak.

DPS berperan sebagai pemeriksa akhir (*final checker*) terhadap aspek kepatuhan syariah dalam proses pembiayaan. Pemeriksaan tersebut mencakup kesesuaian akad, objek pembiayaan, serta mekanisme margin atau bagi hasil sebelum pembiayaan dilaksanakan. Dengan demikian, DPS menjadi salah satu lapisan pengawasan yang membantu memastikan keputusan pembiayaan tetap berada dalam koridor prinsip syariah.

⁷⁰ Nurafida, Putra, and Susilawati, "Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pelaporan Keuangan Koperasi: Studi Kasus Di Kabupaten Bengkalis."

⁷¹ "Integrasi Konsep Koperasi Sebagai Organisasi Bisnis Dengan Strategi Manajemen Dakwah Untuk Membangun Kemandirian Ekonomi Dan Sosial Umat."

⁷² "Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Di KSPPS BMT TAMZIS BINA UTAMA Cabang Secang Kabupaten Magelang."

⁷³ Srivastava, Singh, and Srivastava, *Framework for Measuring the Impact of Islamic Corporate Governance on Sustainable Growth BT - Islamic Finance and Corporate Governance: Synergies for Sustainable Growth*.

Pengawasan harian yang dilakukan DPS mencakup beberapa aspek kritis. Pertama, verifikasi kesesuaian akad yang digunakan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap permohonan pembiayaan harus menggunakan akad yang jelas dan sah secara syariah, seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah, dengan ketentuan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Kedua, pemeriksaan objek pembiayaan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan tidak digunakan untuk kegiatan yang haram atau mengandung unsur gharar dan maisir. Ketiga, evaluasi mekanisme margin atau bagi hasil untuk memastikan bahwa tidak ada unsur eksploitasi atau ketidakadilan bagi anggota.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Melhadi⁷⁴ yang menempatkan DPS sebagai unsur penting dalam memastikan kegiatan lembaga keuangan syariah tetap berada dalam koridor syariah. Puad et al.⁷⁵ juga menegaskan bahwa praktik audit syariah yang efektif dipengaruhi oleh faktor institusional seperti regulasi, norma, dan praktik industri, yang semuanya menjadi bagian penting dari kerangka ICG. Pengawasan harian yang dilakukan DPS di USPPS Koperasi Ausath Blokagung mencerminkan implementasi praktik audit syariah yang berkelanjutan dan terstruktur.

Struktur DPS yang bersifat internal, yaitu dipilih dari lingkungan internal koperasi, terbukti menjadi faktor pemungkin (enabler) yang memperlancar koordinasi intensif melalui forum rapat bulanan dan tahunan. Forum-forum ini dimanfaatkan tidak hanya untuk mengevaluasi kebijakan strategis yang telah dijalankan, tetapi juga untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang mungkin muncul dari dinamika pasar dan perubahan regulasi. Keanggotaan DPS dari lingkungan internal juga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks operasional koperasi, sehingga pengawasan yang dilakukan lebih relevan dan aplikatif.

Pola pengawasan yang intensif dan terintegrasi ini selaras dengan amanat yang ditegaskan dalam POJK Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Koperasi di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan DPS untuk secara aktif memantau dan mengevaluasi seluruh kebijakan strategis lembaga keuangan syariah dalam kerangka kepatuhan syariah yang berkelanjutan⁷⁶. Keterlibatan aktif dan harian DPS ini menjadi sangat krusial, karena setiap potensi penyimpangan syariah yang tidak terdeteksi dan tidak dikoreksi dapat berakumulasi menjadi kerusakan sistemik yang merusak kepercayaan anggota dan menggerus modal sosial yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Penelitian Lestari et al.⁷⁷ mengidentifikasi bahwa tata kelola dewan syariah yang efektif berkontribusi pada kinerja perusahaan melalui peningkatan kepatuhan syariah dan kepercayaan pemangku kepentingan. Temuan di USPPS Koperasi Ausath Blokagung menunjukkan bahwa DPS yang berperan aktif dalam pengawasan harian dapat mencegah penyimpangan syariah dan menjaga integritas lembaga. Hal ini sejalan dengan pandangan Srivastava et al.⁷⁸ bahwa tata kelola dewan syariah merupakan elemen kunci dalam ICG yang mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Keberhasilan DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan harian ini tidak terlepas dari dukungan dari pengurus dan seluruh staf koperasi. Hubungan yang harmonis dan saling percaya antara DPS dan pengurus menciptakan iklim yang kondusif bagi pengawasan yang efektif. DPS tidak dipersepsikan sebagai "polisi" yang mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai mitra yang membantu memastikan bahwa setiap keputusan bisnis tetap berada dalam koridor syariah. Persepsi positif ini mendorong pengurus dan staf untuk secara sukarela berkonsultasi dengan DPS sebelum mengambil keputusan yang berpotensi memiliki implikasi syariah, sehingga pencegahan pelanggaran terjadi sejak dini.

⁷⁴ "Strengthening Sharia Compliance in Indonesian Sharia Cooperatives: A Governance-Based Perspective from Islamic Economic Law."

⁷⁵ *The Effect of Institutional Theory Toward Shariah Audit Practice in Malaysian Takaful Industry.*

⁷⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Koperasi Di Sektor Jasa Keuangan."

⁷⁷ "A Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements: Implications for Indonesia."

⁷⁸ *Framework for Measuring the Impact of Islamic Corporate Governance on Sustainable Growth BT - Islamic Finance and Corporate Governance: Synergies for Sustainable Growth.*

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ridho & Ifada⁷⁹ yang menunjukkan bahwa pendekatan maqāsid dalam pengawasan syariah memberikan dimensi penilaian yang lebih substansial dibandingkan sekadar kepatuhan formal terhadap akad. Hubungan harmonis antara DPS dan pengurus menciptakan lingkungan di mana kepatuhan syariah tidak dipandang sebagai beban, tetapi sebagai nilai tambah yang memperkuat legitimasi dan keberlanjutan lembaga.

Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian kedua bahwa peran strategis DPS dalam mengawal kepatuhan syariah di USPPS Koperasi Ausath Blokagung diwujudkan melalui pengawasan rutin harian sebagai *final checker* setiap transaksi pembiayaan, serta koordinasi intensif melalui forum rapat bulanan dan tahunan. Peran DPS tidak bersifat pasif atau seremonial, tetapi aktif dan strategis dalam memastikan setiap keputusan bisnis tetap berada dalam koridor syariah.

Penelitian Melhadi⁸⁰ menambahkan bahwa implementasi prinsip hukum Islam dan mekanisme pengawasan yang efektif merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Temuan di USPPS Koperasi Ausath Blokagung menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang efektif dibangun melalui peran DPS yang terintegrasi dengan pengurus dan staf, serta didukung oleh pemahaman bersama tentang pentingnya kepatuhan syariah sebagai fondasi keberlanjutan lembaga.

3. Integrasi Islamic Corporate Governance sebagai Instrumen Pencegahan dan Penanganan Mission Drift

Berdasarkan keseluruhan temuan, integrasi nilai-nilai ICG pada Koperasi Ausath USPPS Blokagung tidak hanya tampak pada aspek normatif, tetapi juga diterjemahkan ke dalam sejumlah mekanisme tata kelola, seperti SOP berbasis syariah, pembagian kewenangan, evaluasi internal, dan pengawasan DPS. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga agar aktivitas komersial koperasi tetap berjalan dalam koridor kepatuhan syariah dan tidak mengabaikan kepentingan anggota serta fungsi sosial lembaga.

Dalam konteks penelitian ini, integrasi ICG dipahami sebagai mekanisme yang mendukung pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi *mission drift*. Pemaknaan tersebut didasarkan pada adanya mekanisme pengendalian sebelum, selama, dan setelah aktivitas operasional dilakukan. Namun, temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa USPPS Koperasi Ausath Blokagung telah sepenuhnya terbebas dari *mission drift*.

a. Integrasi nilai-nilai ICG di USPPS Koperasi Ausath Blokagung

Integrasi nilai-nilai ICG di USPPS Koperasi Ausath Blokagung terbukti tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi etis, melainkan sebagai instrumen manajerial yang efektif dan strategis dalam mencegah terjadinya pergeseran misi (*mission drift*), yaitu fenomena di mana lembaga keuangan mikro yang awalnya berorientasi sosial mulai meninggalkan misi awalnya dan terfokus secara berlebihan pada keuntungan finansial. Lembaga ini secara sadar dan konsisten mempertahankan filosofi fundamental bahwa pencapaian profit (*al-riḥḥ*) harus selalu tunduk dan menyesuaikan dengan aturan utama syariah (*al-ḥukm al-syarʿī*). Filosofi ini menjadi benteng kokoh yang mencegah terjadinya penyelewengan visi kemaslahatan (*maqāṣid al-syarʿīyah*), yang merupakan tujuan dasar pendirian koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

b. Memahami Mission Drift dalam Konteks Koperasi Syariah

Mission drift dalam lembaga keuangan syariah tidak semata-mata menunjukkan perubahan strategi bisnis, tetapi merujuk pada potensi pergeseran orientasi kelembagaan dari tujuan sosial dan nilai-nilai syariah menuju dominasi kepentingan finansial. Dalam konteks koperasi syariah, orientasi terhadap keuntungan pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena keberlanjutan finansial diperlukan agar koperasi mampu

⁷⁹ *Assessment of Financial Performance of RSI Sultan Agung Semarang Through the Maqashid Sharia Concordance (MSC) Approach.*

⁸⁰ "Strengthening Sharia Compliance in Indonesian Sharia Cooperatives: A Governance-Based Perspective from Islamic Economic Law."

mempertahankan kegiatan usaha dan memberikan manfaat kepada anggota. Persoalan muncul ketika pencapaian keuntungan tidak lagi ditempatkan sebagai sarana keberlanjutan, melainkan berkembang menjadi orientasi dominan yang menggeser perhatian terhadap kepentingan anggota, keadilan transaksi, kepatuhan syariah, dan fungsi sosial koperasi⁸¹.

Pembahasan mengenai *mission drift* juga menunjukkan bahwa pergeseran misi dapat ditandai oleh dominasi orientasi finansial, kecenderungan memilih anggota yang lebih menguntungkan (*client skimming*), pergeseran dari pelayanan sosial menuju praktik komersial, serta potensi penyalahgunaan mandat kelembagaan⁸². Namun demikian, indikator tersebut dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka analitis, bukan sebagai bukti bahwa seluruh bentuk *mission drift* telah terjadi pada USPPS Koperasi Ausath Blokagung.

Temuan penelitian justru menunjukkan bahwa USPPS tetap menempatkan keberlanjutan finansial sebagai kebutuhan organisasi, tetapi keuntungan ditempatkan dalam koridor prinsip syariah. Filosofi bahwa pencapaian profit (*al-ribh*) harus tunduk pada aturan syariah (*al-hukm al-syar'i*) menunjukkan adanya upaya mempertahankan hubungan antara tujuan ekonomi dan kepatuhan syariah. Temuan ini sejalan dengan argumentasi bahwa koperasi syariah perlu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, fungsi sosial, dan kepatuhan syariah (Lubis, 2026).

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya keuntungan, tetapi pada posisi keuntungan dalam keseluruhan misi kelembagaan. Apabila profit ditempatkan sebagai instrumen untuk mempertahankan keberlanjutan lembaga dan meningkatkan manfaat bagi anggota, maka aktivitas komersial tetap dapat berjalan dalam koridor ekonomi syariah. Sebaliknya, apabila profit menjadi tujuan dominan yang mengorbankan keadilan, kepatuhan syariah, dan fungsi sosial, maka kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko *mission drift*.

c. Landasan Normatif Keseimbangan Ekonomi dan Spiritual

Perspektif tersebut dapat diperkuat melalui QS. Al-Qaşaş [28]:77 yang menegaskan keseimbangan antara orientasi akhirat dan kehidupan dunia:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qaşash [28]: 77)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orientasi terhadap kehidupan akhirat tidak berarti mengabaikan kepentingan dunia, tetapi aktivitas duniawi harus diarahkan kepada kebaikan dan tidak menimbulkan kerusakan⁸³. Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut tidak diposisikan sebagai ayat yang secara langsung membahas *mission drift*, melainkan sebagai landasan normatif untuk menjelaskan pentingnya keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi dan orientasi kemaslahatan.

Keseimbangan tersebut menjadi dasar penting bagi penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG). ICG memungkinkan nilai-nilai seperti *şidq*, amanah, *tabligh*, dan *faţānah*

⁸¹ Akbar, "The Quest for Equilibrium: Navigating Hybrid Logics in Indonesian Islamic Microfinance Bank (BPRS)"; Nashrullah et al., "Institutionalizing Social Entrepreneurship in Pesantren Business Units: A Qualitative Study of Sustainable Community Empowerment in East Java"; Yusa et al., "Analisis Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Usaha Koperasi Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Koperasi Bangun Setia Kecamatan Tabir."

⁸² Akbar, "The Quest for Equilibrium: Navigating Hybrid Logics in Indonesian Islamic Microfinance Bank (BPRS)"; Murah, Rahman, and Harris, "Impact Investing vs. Philanthropy: A Comparative Analysis of Funding Models for Long-Term Sustainability in Social Entrepreneurship"; Purwanto et al., "Alleviating Poverty through Islamic Microfinance: Outreach and Efficiency (Study on BMT and Islamic Cooperatives in Indonesia)."

⁸³ Kementerian Agama Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

diterjemahkan ke dalam mekanisme organisasi sehingga kepatuhan syariah tidak berhenti pada nilai moral, tetapi menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan pengawasan⁸⁴. Dengan demikian, ICG berfungsi sebagai jembatan antara nilai syariah dan praktik tata kelola koperasi.

d. Pelembagaan Nilai ICG melalui SOP, Pembagian Kewenangan, dan Evaluasi Internal

Integrasi ICG pada USPPS terlihat dari penerjemahan nilai-nilai syariah ke dalam mekanisme operasional. Nilai *sidq*, amanah, *tabligh*, dan *fatanah* dilembagakan melalui prosedur, pembagian kewenangan, pengawasan, dan evaluasi⁸⁵.

SOP mengacu pada Fatwa DSN-MUI dengan konsultasi DPS untuk setiap prosedur baru atau perubahan. Prinsip amanah diterjemahkan menjadi mekanisme kelembagaan, di mana pengelola menjalankan kegiatan melalui prosedur sesuai ketentuan syariah. SOP berfungsi sebagai mekanisme preventif yang membatasi keputusan berorientasi keuntungan berlebihan dan menghubungkan kepentingan bisnis dengan kepatuhan syariah⁸⁶.

Pembagian kewenangan dengan limit pembiayaan manajer Rp50.000.000, sedangkan di atasnya memerlukan konsultasi lanjut. Pembatasan ini menunjukkan mekanisme pengendalian pengambilan keputusan, berkaitan dengan akuntabilitas dan *check and balance* untuk mengurangi risiko keputusan terpusat yang mengabaikan kepentingan anggota dan kepatuhan syariah⁸⁷.

Evaluasi internal rutin meninjau aktivitas dan mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan prosedur maupun visi-misi syariah. Evaluasi berfungsi sebagai deteksi dini untuk mengetahui dan memperbaiki penyimpangan sebelum berkembang.

Pengendalian *mission drift* berlangsung melalui tiga tahapan: SOP memberikan batas sebelum kegiatan, pembagian kewenangan mengendalikan saat keputusan dibuat, dan evaluasi memeriksa setelah kegiatan. ICG bekerja sebagai sistem pengendalian berkesinambungan. Penelitian Logan⁸⁸ menunjukkan mekanisme kepemilikan steward dapat mencegah *mission drift*, relevan dengan prinsip kepemilikan koperasi berbasis anggota.

e. DPS sebagai Penghubung antara Aktivitas Ekonomi dan Kepatuhan Syariah

DPS mempunyai posisi strategis dalam integrasi ICG karena berhubungan langsung dengan pengawasan kepatuhan syariah. DPS melakukan pengawasan terhadap permohonan pembiayaan dengan memperhatikan kesesuaian akad, objek pembiayaan, serta mekanisme margin atau bagi hasil sebelum pembiayaan dilaksanakan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keputusan ekonomi di USPPS tidak hanya dinilai berdasarkan kelayakan finansial, tetapi juga melalui perspektif kepatuhan syariah. Fungsi tersebut sejalan dengan penelitian Melhadi⁸⁹ yang menempatkan DPS sebagai unsur penting dalam memastikan kegiatan lembaga keuangan syariah tetap berada dalam koridor syariah. Penelitian Nkabinde & Mamabolo⁹⁰ juga menemukan bahwa perusahaan sosial mengembangkan berbagai strategi untuk menghadapi *mission drift* ketika berhadapan dengan tekanan dari pendana, termasuk memperkuat tata kelola internal dan memperjelas misi organisasi.

⁸⁴ Supar, Safari, and Amelia, "Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift Pada Koperasi Syariah Di Indonesia."

⁸⁵ Supar, Safari, and Amelia, "Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift Pada Koperasi Syariah Di Indonesia"; Riziqiyah, Wati, and Setyorini, "Peningkatan Keberlanjutan Usaha Koperasi Melalui Penguatan Tata Kelola."

⁸⁶ Riziqiyah, Wati, and Setyorini, "Peningkatan Keberlanjutan Usaha Koperasi Melalui Penguatan Tata Kelola."

⁸⁷ Akbar, "The Quest for Equilibrium: Navigating Hybrid Logics in Indonesian Islamic Microfinance Bank (BPRS)."

⁸⁸ "Unveiling the Power of Steward Ownership: A Case Study on Combatting Mission-Drift in Social Enterprises."

⁸⁹ "Strengthening Sharia Compliance in Indonesian Sharia Cooperatives: A Governance-Based Perspective from Islamic Economic Law."

⁹⁰ "The South African Social Enterprises' Strategies to Guard against Mission Drift When Faced with Tensions from the Funders."

Dalam konteks *mission drift*, pengawasan DPS memiliki arti penting karena risiko pergeseran misi dapat muncul ketika orientasi finansial menyebabkan batas-batas syariah semakin diabaikan. Pengawasan terhadap akad, objek pembiayaan, serta mekanisme margin atau bagi hasil memberikan lapisan pengendalian yang memungkinkan keputusan ekonomi ditinjau dari dua sisi sekaligus, yaitu kelayakan bisnis dan kepatuhan syariah.

Prinsip pengawasan tersebut dapat dikaitkan dengan QS. An-Nisā' [4]:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil..." (QS. An-Nisā' [4]:58).

Ayat tersebut menekankan kewajiban menunaikan amanah kepada pihak yang berhak dan menetapkan keputusan secara adil. Prinsip tersebut relevan dengan tata kelola koperasi karena pengelolaan dana, kewenangan, dan keputusan pembiayaan merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan ICG dapat dipahami sebagai salah satu bentuk institusionalisasi nilai amanah dan keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Pada aspek regulasi, DPS pada USPPS dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme pengawasan yang menjaga hubungan antara aktivitas ekonomi koperasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Perannya bukan sekadar memberikan legitimasi syariah terhadap transaksi, tetapi menjadi bagian dari sistem tata kelola yang memungkinkan potensi penyimpangan diidentifikasi dan dikoreksi. Hal ini sejalan dengan ketentuan POJK Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah oleh koperasi di sektor jasa keuangan⁹¹.

f. Keseimbangan Profitabilitas, Keadilan Transaksi, dan Fungsi Sosial

Integrasi ICG terlihat dalam cara USPPS mengelola hubungan antara kepentingan finansial koperasi dan anggota. Praktik negosiasi margin dilakukan melalui proses negosiasi dengan anggota hingga tercapai kesepakatan. Hubungan koperasi dan anggota tidak sepihak, tetapi memberikan ruang kesepakatan dalam transaksi.

Profit tidak dengan sendirinya menunjukkan *mission drift*. Profit diperlukan untuk keberlanjutan lembaga, membiayai operasional, dan mempertahankan pelayanan. Permasalahan muncul ketika keuntungan mengakibatkan anggota kehilangan posisi adil dalam transaksi. Negosiasi margin menjaga keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan kepentingan anggota.

Prinsip ini sejalan dengan ekonomi syariah yang menempatkan transaksi dalam kerangka keadilan, kerelaan, dan tanggung jawab. Keuntungan diperoleh melalui mekanisme sesuai syariah dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Pencegahan *mission drift* tidak dengan menolak orientasi ekonomi, tetapi mengendalikan cara orientasi tersebut diwujudkan⁹².

Di samping fungsi komersial, menurut Manajer, pengelolaan dana ZISWAF melalui proposal donasi menunjukkan fungsi sosial tetap memiliki ruang (Wawancara, 22 Juli 2026). Di samping fungsi komersial, pengelolaan dana ZISWAF melalui proposal donasi menunjukkan fungsi sosial tetap memiliki ruang.

Fungsi sosial menjadi indikator koperasi mempertahankan orientasi sosial di samping aktivitas ekonomi. Dalam perspektif maqāṣid, keberhasilan lembaga tidak cukup dinilai dari indikator finansial. Keberlanjutan ekonomi perlu berjalan bersama penciptaan kemaslahatan

⁹¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Koperasi Di Sektor Jasa Keuangan."

⁹² Murah, Rahman, and Harris, "Impact Investing vs. Philanthropy: A Comparative Analysis of Funding Models for Long-Term Sustainability in Social Entrepreneurship."

bagi anggota dan masyarakat⁹³. Negosiasi margin dan ZISWAF adalah dua mekanisme saling melengkapi: menjaga hubungan ekonomi dengan anggota dan mempertahankan dimensi sosial lembaga.

Koperasi syariah berbeda dari organisasi yang semata-mata berorientasi keuntungan. Profit dibutuhkan tetapi ditempatkan dalam kerangka tujuan lebih luas. *Mission drift* terjadi ketika profit kehilangan keterkaitan dengan tujuan sosial, kepatuhan syariah, dan kemaslahatan⁹⁴.

g. Integrasi ICG sebagai Mekanisme Pencegahan dan Deteksi Dini Mission Drift

Berdasarkan keseluruhan temuan, integrasi ICG pada Koperasi Ausath USPPS Blokagung membentuk mekanisme tata kelola yang saling berkaitan. SOP berbasis Fatwa DSN-MUI memberikan batas normatif terhadap aktivitas operasional; pembagian kewenangan memberikan pengendalian terhadap pengambilan keputusan; evaluasi internal memberikan ruang deteksi terhadap kemungkinan penyimpangan; DPS memberikan pengawasan kepatuhan syariah; negosiasi margin menjaga keseimbangan kepentingan ekonomi dan anggota; sedangkan pengelolaan ZISWAF mempertahankan dimensi sosial koperasi.

Jika dibaca bersama dengan literatur ICG, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa tata kelola syariah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap akad, tetapi juga dengan bagaimana organisasi menjaga amanah, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial⁹⁵. Dalam konteks *mission drift*, nilai-nilai tersebut menjadi penting karena memberikan batas normatif terhadap kemungkinan berkembangnya orientasi finansial secara berlebihan.

Akuntabilitas dalam ICG juga memiliki dimensi yang lebih luas daripada akuntabilitas organisasi konvensional. Akuntabilitas dipahami tidak hanya sebagai pertanggungjawaban horizontal kepada anggota dan pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT⁹⁶. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa keputusan ekonomi dalam lembaga syariah memiliki dimensi moral dan spiritual. Pengelola tidak hanya mempertanggungjawabkan apakah keputusan tersebut menguntungkan organisasi, tetapi juga apakah keputusan tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kemaslahatan.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, mekanisme tersebut kemudian memperoleh arah substantif. ICG memberikan cara organisasi dikelola, DPS memberikan mekanisme pengawasan kepatuhan syariah, sedangkan maqāṣid memberikan orientasi kemaslahatan yang hendak dicapai⁹⁷. Ketiganya saling melengkapi dalam menjaga agar aktivitas ekonomi tidak berkembang menjadi tujuan yang menggeser misi sosial koperasi.

Berdasarkan sintesis hasil wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menemukan adanya hubungan mekanisme tata kelola yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Nilai syariah → SOP → pembagian kewenangan → evaluasi → pengawasan DPS → keadilan transaksi → fungsi sosial → kemaslahatan → pencegahan dan deteksi dini *mission drift*.

⁹³ Lubis, "Akuntabilitas Berbasis Transendensi: Penerapan Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah."

⁹⁴ Nashrullah et al., "Institutionalizing Social Entrepreneurship in Pesantren Business Units: A Qualitative Study of Sustainable Community Empowerment in East Java."

⁹⁵ Riziqiyah, Wati, and Setyorini, "Peningkatan Keberlanjutan Usaha Koperasi Melalui Penguatan Tata Kelola"; Supar, Safari, and Amelia, "Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift Pada Koperasi Syariah Di Indonesia."

⁹⁶ Akbar, "The Quest for Equilibrium: Navigating Hybrid Logics in Indonesian Islamic Microfinance Bank (BPRS)"; Nashrullah et al., "Institutionalizing Social Entrepreneurship in Pesantren Business Units: A Qualitative Study of Sustainable Community Empowerment in East Java."

⁹⁷ Lubis, "Akuntabilitas Berbasis Transendensi: Penerapan Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah."

Rangkaian tersebut menggambarkan mekanisme pengendalian yang berlapis. Nilai syariah menjadi landasan normatif, SOP menerjemahkannya ke dalam prosedur, pembagian kewenangan memberikan batas dalam pengambilan keputusan, sedangkan evaluasi dan pengawasan DPS menyediakan mekanisme pemeriksaan. Pada sisi keluaran, mekanisme tersebut diarahkan untuk menjaga keadilan transaksi dan keberlanjutan fungsi sosial koperasi. Dengan demikian, integrasi ICG dapat dipahami sebagai mekanisme yang mendukung pencegahan dan deteksi dini potensi *mission drift*.

h. Analisis dan Interpretasi Temuan

Meskipun demikian, karakter data penelitian perlu menjadi pertimbangan dalam menafsirkan temuan. Data penelitian terutama berasal dari wawancara dan dokumentasi mengenai mekanisme tata kelola, pengawasan, serta kepatuhan syariah. Penelitian ini belum memiliki data longitudinal yang merekam suatu kasus *mission drift* secara aktual, proses penanganannya, dan perubahan kondisi setelah intervensi tata kelola dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa *mission drift* telah sepenuhnya dihilangkan, melainkan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme ICG dan pengawasan DPS dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi pergeseran misi.

Data wawancara menunjukkan adanya mekanisme pengawasan, evaluasi, dan kepatuhan, tetapi belum menunjukkan data longitudinal mengenai suatu kasus *mission drift* yang terjadi, kemudian ditangani dan diukur keberhasilan pemulihannya. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih tepat menyimpulkan bahwa integrasi ICG membentuk mekanisme yang diarahkan untuk mencegah dan mendeteksi dini potensi *mission drift* daripada menyatakan bahwa ICG secara empiris telah terbukti menghilangkan *mission drift*.

Dengan demikian, istilah "penanganan" dalam konteks penelitian dapat dipahami sebagai mekanisme korektif yang tersedia ketika ditemukan ketidaksesuaian, sedangkan bukti empiris yang paling kuat dari penelitian berada pada aspek pencegahan, pengawasan, dan deteksi dini. Formulasi tersebut menjaga agar kesimpulan penelitian tidak melampaui data yang diperoleh melalui wawancara.

Temuan penelitian menjawab pertanyaan penelitian ketiga dengan menunjukkan bahwa integrasi ICG dan peran DPS membentuk sejumlah mekanisme yang mendukung pencegahan dan deteksi dini potensi *mission drift*. Mekanisme tersebut meliputi SOP berbasis syariah, sistem limit wewenang, evaluasi internal, pengawasan DPS, praktik negosiasi margin, dan pengelolaan fungsi sosial melalui ZISWAF. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan misi sosial-religius koperasi.

Pada akhirnya, integrasi ICG pada USPPS Koperasi Ausath Blokagung memperlihatkan bahwa tata kelola syariah tidak harus diposisikan sebagai penghambat aktivitas bisnis. Sebaliknya, tata kelola syariah berfungsi untuk memastikan agar aktivitas bisnis berjalan dalam koridor amanah, keadilan, kepatuhan, dan kemaslahatan. Profit tetap diperlukan sebagai instrumen keberlanjutan, tetapi tidak ditempatkan sebagai pengganti misi sosial koperasi. SOP, pembagian kewenangan, evaluasi, DPS, negosiasi margin, dan ZISWAF menunjukkan bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan.

Dalam konteks *mission drift*, integrasi ICG dipahami sebagai mekanisme yang mendukung pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi pergeseran misi. Pemaknaan tersebut didasarkan pada adanya mekanisme pengendalian sebelum, selama, dan setelah aktivitas operasional dilakukan⁹⁸.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada temuan bahwa pencegahan *mission drift* tidak dilakukan dengan menghilangkan orientasi komersial, melainkan dengan mengintegrasikan orientasi komersial ke dalam sistem tata kelola yang dikendalikan oleh prinsip syariah dan diarahkan pada kemaslahatan. ICG menjadi instrumen

⁹⁸ Alamer, "Accountability in Sharia Governance: Is It Time for Sharia Firms?"; Basiruddin and Ahmed, "Corporate Governance and Shariah Non-Compliant Risk in Islamic Banks: Evidence from Southeast Asia."

yang menjaga hubungan tersebut melalui penguatan akuntabilitas, pengawasan syariah, pengendalian internal, keadilan transaksi, dan pemeliharaan fungsi sosial. Pada titik inilah ICG tidak sekadar menjadi perangkat tata kelola, tetapi menjadi mekanisme untuk menjaga agar perkembangan ekonomi koperasi tidak memutus hubungan dengan misi sosial dan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar keberadaannya.

4. Efektivitas Integrasi ICG dalam Mencegah Mission Drift

Untuk memperjelas mekanisme pencegahan *mission drift*, penelitian ini memetakan hubungan antara implementasi ICG dan pengurangan risiko pergeseran misi sebagai berikut: Pertama, nilai Amanah diwujudkan melalui penyusunan SOP yang berbasis pada Fatwa DSN-MUI, yang secara langsung mencegah penetapan margin yang tidak adil dan menjaga misi pemberdayaan ekonomi anggota. Kedua, peran aktif DPS melalui pengawasan harian terhadap seluruh permohonan pembiayaan memungkinkan deteksi dini terhadap setiap potensi penyimpangan akad, sehingga kepatuhan syariah dapat dipertahankan secara konsisten. Ketiga, nilai Tabligh yang diterapkan melalui mekanisme evaluasi internal harian berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan menjaga integritas pengelolaan koperasi. Keempat, nilai Fatanah yang diimplementasikan melalui sistem limit wewenang berjenjang mencegah terjadinya keputusan bisnis yang mengabaikan prinsip syariah dan menghindari praktik ribawi yang dapat menggeser misi sosial lembaga.

Langkah preventif yang paling nyata dan operasional terlihat pada prosedur penentuan margin pembiayaan. Berbeda dengan praktik konvensional yang umumnya menetapkan margin secara sepihak dan seragam, di koperasi ini prosedur penentuan margin dilakukan melalui proses negosiasi yang interaktif dengan anggota, yang berlangsung hingga tercapainya kesepakatan bersama (*taṭābu'*). Proses negosiasi ini secara langsung mencerminkan prinsip keadilan (*'adl*) yang menjadi salah satu pilar utama maqāṣid al-syarī'ah, karena tidak ada pihak, baik koperasi maupun anggota, yang dirugikan atau dieksploitasi dalam transaksi tersebut. Selain itu, keadilan juga terwujud dalam bentuk kesukarelaan (*'an tarāḍin*) yang menjadi syarat sahnya setiap akad dalam Islam.

Di samping aspek komersial, peran sosial koperasi tetap dijalankan secara seimbang melalui penyaluran dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) yang dikelola dengan prosedur berbasis pengajuan proposal donasi. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan distributif dan kepedulian terhadap kaum dhuafa tetap menjadi prioritas yang tidak terpinggirkan oleh kegiatan ekonomi produktif. Penelitian Solihati et al.⁹⁹ menegaskan bahwa integrasi strategi manajemen dakwah dalam tata kelola koperasi dapat memperkuat identitas keislaman lembaga dan mencegah pergeseran misi.

Integrasi model tata kelola ini memastikan adanya keseimbangan dinamis antara kinerja ekonomi (*al-falāḥ al-iqtisādī*) dan pencapaian nilai-nilai sosial-spiritual (*al-falāḥ al-ijtimā'ī wa al-rūḥī*), yang merupakan inti dan esensi dari penerapan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam lembaga keuangan mikro syariah. Keseimbangan ini pada gilirannya memperkuat legitimasi koperasi di mata anggota dan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan jangka panjang (*sustainability*) yang tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari aspek sosial dan religius.

Dengan mekanisme yang terintegrasi ini, koperasi mampu membangun sistem *early warning* terhadap setiap potensi penyimpangan dari misi awal, sehingga *mission drift* dapat dicegah secara sistemik, bukan sekadar reaktif. Kesadaran teologis bahwa setiap keputusan bisnis adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT (*tawhidic accountability*) juga menjadi benteng spiritual yang memperkuat komitmen terhadap misi sosial, karena pengurus tidak hanya takut pada sanksi organisasi atau regulator, tetapi juga pada sanksi moral-spiritual di akhirat.

⁹⁹ "Integrasi Konsep Koperasi Sebagai Organisasi Bisnis Dengan Strategi Manajemen Dakwah Untuk Membangun Kemandirian Ekonomi Dan Sosial Umat."

Dengan mekanisme yang terintegrasi ini, koperasi mampu membangun sistem *early warning* terhadap setiap potensi penyimpangan dari misi awal, sehingga *mission drift* dapat dicegah secara sistemik, bukan sekadar reaktif¹⁰⁰.

KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) dalam tata kelola syariah pada Koperasi Ausath USPPS Blokagung telah diwujudkan melalui berbagai mekanisme kelembagaan, antara lain penerapan SOP berbasis prinsip syariah, pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, evaluasi internal, transparansi dalam pengelolaan koperasi, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ICG tidak hanya ditempatkan sebagai landasan normatif, tetapi telah diupayakan untuk diterapkan dalam proses pengelolaan dan pengawasan koperasi.

Integrasi ICG tersebut berperan dalam memperkuat tata kelola syariah dengan menjaga keselarasan antara tujuan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif *mission drift*, mekanisme tata kelola tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi pergeseran orientasi koperasi dari tujuan sosial dan syariah menuju orientasi ekonomi yang berlebihan. Dengan demikian, penerapan ICG pada Koperasi Ausath USPPS Blokagung menunjukkan adanya upaya kelembagaan untuk mempertahankan konsistensi antara misi koperasi, prinsip syariah, dan keberlanjutan ekonomi.

Namun demikian, temuan penelitian ini tidak dapat dimaknai bahwa *mission drift* telah sepenuhnya dihilangkan. Integrasi ICG lebih tepat dipahami sebagai mekanisme tata kelola yang dapat meminimalkan risiko, mengidentifikasi gejala awal, dan mengendalikan potensi terjadinya *mission drift*. Efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi implementasi, independensi pengawasan, transparansi, evaluasi berkelanjutan, serta komitmen seluruh pihak dalam mempertahankan orientasi syariah dan tujuan sosial koperasi. Oleh karena itu, penguatan ICG secara berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan bahwa perkembangan dan keberlanjutan Koperasi Ausath USPPS Blokagung tetap berjalan sejalan dengan nilai-nilai syariah dan tujuan kemaslahatan sebagaimana tercermin dalam prinsip *Maqāṣid al-Syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. N., and R. Indrarini. "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Simpanan Syariah." *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 300–315.
- Akbar, T. "The Quest for Equilibrium: Navigating Hybrid Logics in Indonesian Islamic Microfinance Bank (BPRS)." *Keunis* 13, no. 2 (2025): 246–59. <https://doi.org/10.32497/keunis.v13i2.6503>.
- Alamer, S. A. "Accountability in Sharia Governance: Is It Time for Sharia Firms?" *Journal of Corporate Law Studies*, 2022.
- Aslam, E., and R. Haron. "Does Corporate Governance Affect the Performance of Islamic Banks? New Insight into Islamic Countries." *Corporate Governance (Bingley)*, 2020.
- Basiruddin, R., and H. Ahmed. "Corporate Governance and Shariah Non-Compliant Risk in Islamic Banks: Evidence from Southeast Asia." *Corporate Governance (Bingley)*, 2020.
- Boulanouar, Z., R. Grassa, A. Naouar, and A. El Ammari. "Does Sharia Governance Deter Bank Risk-Taking? Evidence from Profit-Sharing Accounts and Board Financial Expertise." *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 2026.
- Creswell, J. W., and C. N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. SAGE Publications, 2018.
- Fahrudin, A., Purwanto, and F. Y. A. Rifa'i. "Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Di KSPPS BMT TAMZIS BINA UTAMA Cabang Secang Kabupaten Magelang." *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2023): 45–58.

¹⁰⁰ Z. Boulanouar et al., "Does Sharia Governance Deter Bank Risk-Taking? Evidence from Profit-Sharing Accounts and Board Financial Expertise," *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 2026.

- Hassan, M. A. D., M. H. A. H. Besar, and J. H. Jaidin. "The Role of the Shariah Board in Protecting and Promoting the Stakeholders' Rights in Bahrain." *Journal of Shariah Law Research*, 2024.
- Hutagalung, M. W. R., and S. Batubara. "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1494–98.
- Irawan, M., D. Darmawati, N. Fadhillah, and Y. Noni. "Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Pada Pondok Pesantren Modern Al Muttaqien Balikpapan." *BIFEJ (Borneo Islamic Finance and Economics Journal)* 2, no. 1 (2022): 37–51. <https://doi.org/10.21093/bifej.v0i0.4638>.
- Iswandi, A. "Tata Kelola Koperasi Syariah Di Indonesia: Studi Literatur Review." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 15, no. 02 (2021): 101–9. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v15i02.1527>.
- Kuangan, Otoritas Jasa. "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2024." Preprint, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2025.
- . "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Koperasi Di Sektor Jasa Keuangan." Preprint, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.
- Khan, I., and S. N. Zahid. "The Impact of Shari'ah and Corporate Governance on Islamic Banks Performance: Evidence from Asia." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2020.
- Lestari, I. P., M. M. Hanafi, and L. I. Wardhana. "A Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements: Implications for Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 11, no. 1 (2025): 91–118.
- Logan, M. "Unveiling the Power of Steward Ownership: A Case Study on Combatting Mission-Drift in Social Enterprises." University of Amsterdam & Vrije University Amsterdam, 2024.
- Lubis, A. T. "Akuntabilitas Berbasis Transendensi: Penerapan Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Welfare: Journal of Islamic Economics and Finance* 5, no. 1 (2026): 53–70.
- Melhadi, M. "Strengthening Sharia Compliance in Indonesian Sharia Cooperatives: A Governance-Based Perspective from Islamic Economic Law." *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2026): 146–60. <https://doi.org/10.31958/ab.v6i2.17087>.
- Murah, R. Rahman, and R. Harris. "Impact Investing vs. Philanthropy: A Comparative Analysis of Funding Models for Long-Term Sustainability in Social Entrepreneurship." *Journal of Social Entrepreneurship and Creative Technology* 2, no. 4 (2025): 187–201. <https://doi.org/10.70177/jseact.v2i4.2595>.
- Nashrullah, M. H., A. M. Hamid, Nawari, and I. Ahmed. "Institutionalizing Social Entrepreneurship in Pesantren Business Units: A Qualitative Study of Sustainable Community Empowerment in East Java." *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 9, no. 2 (2026): 393–409. <https://doi.org/10.52166/adilla.v9i2.8033>.
- Nkabinde, S., and A. Mamabolo. "The South African Social Enterprises' Strategies to Guard against Mission Drift When Faced with Tensions from the Funders." *Cogent Business & Management* 9 (2022): 2135215. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2135215>.
- Nurafida, D. M. S. Putra, and Susilawati. "Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pelaporan Keuangan Koperasi: Studi Kasus Di Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2025): 613–19.
- Puad, N. A. M., N. I. Abdullah, and Z. Shafii. *The Effect of Institutional Theory Toward Syariah Audit Practice in Malaysian Takaful Industry*. Edited by N. Mansour and L. M. B. B. T.-Islamic Sustainable Finance Vadell Law and Innovation. Springer Nature Switzerland AG, 2023.
- Purwanto, I. Primiana, D. Masyita, and E. Febrian. "Alleviating Poverty through Islamic Microfinance: Outreach and Efficiency (Study on BMT and Islamic Cooperatives in

- Indonesia)." *Ekonomika Regiona* 16, no. 4 (2020): 1362–76. <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-4-24>.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Ridho, M. A., and L. M. Ifada. *Assessment of Financial Performance of RSI Sultan Agung Semarang Through the Maqashid Sharia Concordance (MSC) Approach*. Edited by N. Mansour and L. M. B. B. T.-Islamic Sustainable Finance Vadell Law and Innovation. Springer Nature Switzerland AG, 2023.
- Riziqiyah, M. F., L. K. Wati, and R. Setyorini. "Peningkatan Keberlanjutan Usaha Koperasi Melalui Penguatan Tata Kelola." *Jurnal Kreativitas Dan Inovasi (Jurnal Kreanova)* 5, no. 3 (2025): 112–24. <https://doi.org/10.24034/kreanova.v5i3.7302>.
- Solihati, A. T., F. Diaz, Ninuk, Sugianto, P. Wati, Parjono, and M. Suryandari. "Integrasi Konsep Koperasi Sebagai Organisasi Bisnis Dengan Strategi Manajemen Dakwah Untuk Membangun Kemandirian Ekonomi Dan Sosial Umat." *JURIMBIK* 6, no. 1 (2026): 503–20.
- Srivastava, S., M. Singh, and S. P. Srivastava. *Framework for Measuring the Impact of Islamic Corporate Governance on Sustainable Growth BT - Islamic Finance and Corporate Governance: Synergies for Sustainable Growth*. 2025.
- Supar, A. Safari, and A. Amelia. "Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift Pada Koperasi Syariah Di Indonesia." *J-EBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2025): 103–14. <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v4.i02.214>.
- Yin, R. K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. SAGE Publications, 2018.
- Yusa, A. A., A. Alkhozi, A. Gigin, and I. Khoirudin. "Analisis Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Usaha Koperasi Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Koperasi Bangun Setia Kecamatan Tabir." *SJEE (Scientific Journals of Economic Education)* 10, no. 1 (2026): 1–5. <https://doi.org/10.33087/sjee.v10i1.310>.